

**ANALISIS PENGARUH MEKANISME *GOOD  
CORPORATE GOVERNANCE* DAN PRIVATISASI  
TERHADAP KINERJA KEUANGAN**  
(Studi pada BUMN yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia  
periode privatisasi 2002-2006)



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh

**ARDIAN GANANG RIYANTO**  
**NIM. C2A007014**

**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**  
**2011**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ardian Ganang Riyanto  
Nomor Induk Mahasiswa : C2A007014  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Manajemen

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH MEKANISME  
*GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN  
PRIVATISASI TERHADAP KINERJA  
KEUANGAN: Studi pada BUMN yang  
Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (BEI)  
Periode 2002-2006**

Dosen Pembimbing : Harjum Muharam, SE., ME.

Semarang, 21 Juni 2011

Dosen Pembimbing

(Harjum Muharam, SE., ME.)

NIP. 197202182000031001

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Mahasiswa : Ardian Ganang Riyanto

Nomor Induk Mahasiswa : C2A007014

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Manajemen

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH MEKANISME  
*GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN  
PRIVATISASI TERHADAP KINERJA  
KEUANGAN: Studi pada BUMN yang  
Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (BEI)  
Periode 2002-2006**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 27 Juni 2011**

Tim Penguji :

1. Harjum Muharam, SE., M.E ( ..... )

2. . ( ..... )

3. ( ..... )

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ardian Ganang Riyanto menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Dan Privatisasi Terhadap Kinerja Keuangan, Studi pada BUMN yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (BEI)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 16 Juni 2011  
Yang membuat pernyataan,

(Ardian Ganang R)  
NIM. C2A007014

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

*"Allah mengangkat orang yang beriman dari golonganmu dan juga orang-orang yang dikurniakan Ilmu Pengetahuan hingga beberapa derajat" (al-Mujadalah ayat 11)*

*"Be thankful for what you have; you'll end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never, ever have enough."*

*~ Oprah Winfrey ~*

*"Winner never give up trying, meanwhile loser doesnt even try."*

*~ Bill Rancic ~*

*"Greatness lives on the edge of destruction."*

*~ Will Smith ~*

*"Berusahalah jadi manusia biasa, Bekerjalah dengan luar biasa, Beribadahlah senantiasa"*

*~ Ardian Ganang ~*

### Persembahan

*Skripsi ini didedikasikan untuk keluarag saya yang selama ini telah membimbing saya dan keluarga besar di solo, serta untuk kado ulang tahun kakak dan calon keponakan saya yang masih dalam kandungan.*

## ABSTRAK

Saat ini banyak BUMN yang melakukan privatisasi dan menerapkan *good corporate governance*, guna meningkatkan efisiensi dan kinerja, namun masih banyak ditemukan BUMN yang melanggar ketentuan *good corporate governance* sehingga terkadang cara tersebut tidak efektif untuk meningkatkan kinerja. Penelitian bertujuan untuk menemukan bukti empiris pengaruh elemen-elemen dalam penerapan *good corporate governance* dan privatisasi terhadap kinerja perusahaan BUMN di Indonesia. Baik *good corporate governance* maupun privatisasi sudah banyak dilakukan penelitian terhadap kinerja, namun hasil penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan sampel adalah perusahaan BUMN yang diprivatisasi sebelum tahun 2007. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda.

Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t dengan taraf signifikansi 5%. Sedangkan untuk mengukur validitas dan reliabilitas digunakan product moment Pearson dan cronbach's alpha. Serta untuk melakukan pengujian analisis statistik digunakan alat bantu yaitu program SPSS 17.0.

Dari pengujian hasil hipotesis, mekanisme *good corporate governance* yang diproksi ukuran dewan komisaris dan komite audit mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja, serta variabel ukuran perusahaan mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja. Sedangkan latar belakang pendidikan komisaris utama dan proporsi dewan komisaris secara signifikan tidak dapat mempengaruhi kinerja. Untuk variabel privatisasi secara signifikan juga tidak mempengaruhi kinerja.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, Latar Belakang Pendidikan Komisaris, Ukuran Dewan komisaris, Komisaris Independen, Komite audit. Privatisasi dan NPM.

## **ABSTRACT**

*At this time, many BUMN does privatization dan implementation good corporate governance, toward to efficiency and perform, eventhogt , many of them are still breaking the law for good corporate governance, furthermore some of those option are not efektifive toward to performanceThis research has purpose to find any empirical evidence about influence of many element of corporate governance's and also privatization implementation toward to performance of BUMN in Indonesia. The research about corporate governance's and also privatization perspective toward the performance has commonly focused, but any findings show inconsistency results. Further reconciliation of this result, it's interesting to make research with different object.*

*The hypothesis testing were using F test and t test with a significance level of 5%. As for measuring the validity and reliability this study using Pearson's product moment and cronbach's alpha. And the tool to test the statistical analysis is SPSS 17.0.*

*Results show that influence of corporate governance that proximate size board of commissioner, and audit committee have positively influence and also control variabel firm size have positively influence otherwise, education bussines background of vice president, existence of independent commissioner and Privatization. has negatively and significant influence*

*Keywords: Corporate governance's perspective, education bussines background of vice president, size board of commissioner, and audit committee, existence of independent commissioner, Privatization, NPM.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Dan Privatisasi Terhadap Kinerja Keuangan, Studi pada BUMN yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (BEI)**”, yang disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana (S1) Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, MSi, Akt, Ph.D, selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Harjum Muharam, SE., ME. selaku dosen pembimbing atas segala waktu, perhatian dan segala bimbingan serta arahannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Farida Indriani, SE, MM. selaku dosen wali yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir studi di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.



4. Kedua orangtua, ayahanda Dr. Guntur Riyanto, Msi dan Ibunda Neneng Setyowati, SE serta Eyang Kakung atas doa restu, kasih sayang, dan dukungan moral serta dukungan finansial selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Kakak penulis dr. Cindarwati Mega Riyanto, dr. Moh. Reza dan adik Nariska PR yang selalu memberikan dukungan dan doa setiap saat.
6. Sherly Octaviasari, *thank you for all this happines that u brought to my life. I think you the one and only forever.*
7. Tante dan Om Sudibyoy, eyang dan keluarga besar, terimakasih sebesar-besarnya atas segala dukungannya selama ini.
8. Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, terimakasih atas kesabaran dan kemudahan-kemudahan yang diberikan.
9. Anak-anak Wisma Sarjana ( Adip, Jabar, Ichan, Aboy, Okky, Rikky, Iqbal, Gayu, Haikal, Eki, Andrio dll), terimakasih banyak atas doa dan bantuannya.
10. Para sahabat penulis dan *managementsquad* dalam susunan yang tidak berurutan ( Wahyu, Zia, Wulan, Nimas, Yudha, Arbi, Broto, Deki, Indri, Sandinyo, Abbas, Mute, Deded, Gemma, sueb, Alza, Brantas, Iko, Usy, Mba Put, Indri, Putriadi, Ucup, Rio ) atas segala dukungan, pemacu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, serta kebersamaannya selama ini.

Semarang, 21 Juni 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
1.5 Sistematika Penulisan .....	14
BAB II TELAAH PUSTAKA .....	17
2.1 Landasan Teori .....	17
2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan BUMN .....	17
2.1.2 Pengertian Privatisasi .....	19
2.1.2.1 Pengertian Privatisasi .....	19
2.1.2.2 Pengertian <i>The Property Right Approach</i> .....	20
2.1.2.3 Pengertian <i>Public Choice Approach</i> .....	24
2.1.3 Pengertian <i>Good Corporate Governance</i> .....	25
2.1.3.1 Pengertian <i>Good Corporate Governance</i> .....	25
2.1.3.2 Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	26
2.1.4 Pengertian <i>Board of Commisioner</i> .....	29
2.1.5 Pengertian Komite Audit .....	30
2.1.6 Pengertian Komisaris Independen.....	31
2.1.7 Pengertian Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama .....	32
2.1.8 Pengertian Ukuran Perusahaan .....	33
2.1.9 Pengertian Kinerja Perusahaan .....	33
2.2 Hubungan Antar Variabel .....	34
2.2.1 Pengaruh <i>Board Size</i> Terhadap Tingkat Kinerja Keuangan .....	34

2.2.2	Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Tingkat Kinerja Keuangan. ....	35
2.2.3	Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama Dan Kinerja Keuangan Perusahaan. ....	35
2.2.4	Pengaruh Komite Audit dan Kinerja Keuangan Perusahaan ....	36
2.2.5	Pengaruh Privatisasi dan Kinerja Keuangan BUMN ....	37
2.2.6	Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kinerja Keuangan BUMN ....	38
2.3	Penelitian Terdahulu .....	39
2.4	Kerangka Pemikiran Penelitian .....	42
BAB III METODE PENELITIAN .....		44
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	44
3.1.1	Variabel Penelitian dan Pengukurannya .....	44
3.1.2	Definisi Operasional .....	45
3.2	Penentuan Populasi dan Sampel .....	48
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	49
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	50
3.5	Metode Analisis Data .....	50
3.5.1	Statistik Deskriptif .....	51
3.5.2	Uji Asumsi Klasik .....	51
3.5.2.1	Uji Normalitas .....	51
3.5.2.2	Uji Multikolinieritas .....	52
3.5.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	52
3.5.2.4	Uji Autokorelasi .....	53
3.5.3	Analisis Regresi OLS .....	55
3.5.4	Pengujian Hipotesis .....	56
3.5.4.1	Uji Koefisien Determinasi .....	56
3.5.4.2	Uji Signifikansi Simultan .....	57
3.5.4.3	Uji Signifikansi Parameter Individual .....	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....		59
4.1	Gambaran Umum dan Deskripsi Variabel Penelitian .....	59
4.1.1	Gambaran Umum Penelitian .....	59
4.1.2	Deskripsi Variabel Penelitian .....	59
4.2	Analisis Data .....	63
4.2.1	Uji Asumsi Klasik .....	64
4.2.1.1	Outlier Data .....	64
4.2.1.2	Uji Normalitas Data .....	65
4.2.1.3	Uji Multikolinieritas .....	67

4.2.1.4 Uji Autokorelasi .....	67
4.2.1.5 Uji Heteroskedastisitas.....	70
4.2.1.6 Analisis Regresi .....	71
4.3 Uji Hipotesis .....	74
4.3.1 Uji Koefisien Determinasi .....	74
4.2.4.2 Uji Statistik F (Uji <i>Goodness of Fit</i> ) .....	75
4.2.4.3 Uji Parsial (Uji t) .....	76
4.4 Interpretasi hasil .....	81
4.4.1 Interpretasi Hasil Pengujian Statistik untuk $H_1$ .....	81
4.4.2 Interpretasi Hasil Pengujian Statistik untuk $H_2$ .....	82
4.4.3 Interpretasi Hasil Pengujian Statistik untuk $H_3$ .....	83
4.4.4 Interpretasi Hasil Pengujian Statistik untuk $H_4$ .....	84
4.4.5 Interpretasi Hasil Pengujian Statistik untuk $H_5$ .....	85
4.4.6 Interpretasi Hasil Pengujian Statistik untuk $H_6$ .....	86
BAB V PENUTUP .....	87
5.1 Simpulan .....	87
5.2 Implikasi Teoritis .....	88
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	89
5.4 Saran.....	90
5.4.1 Bagi Investor .....	90
5.4.2 Bagi Perusahaan .....	91
5.4.3 Bagi Pemerintah .....	92
5.4.4 Agenda Penelitian Mendatang .....	93
DAFTAR PUSTAKA .....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	98

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Matrik Penelitian Terdahulu .....	40
Tabel 3.1 Definisi Variabel Penelitian .....	48
Tabel 3.1 Sampel Penelitian .....	49
Tabel 4.1 Analisis Deskriptif Variabel.....	60
Tabel 4.2 Analisis Deskriptif Variabel Pendidikan Berdasarkan Kinerja Perusahaan.....	62
Tabel 4.3 Analisis Deskriptif Variabel Privatisasi Berdasarkan Kinerja Perusahaan .....	62
Tabel 4.4 Analisis Deskriptif Variabel Ukuran Dewan Komisaris Berdasarkan Kinerja Perusahaan.....	63
Tabel 4.5 Identifikasi Data <i>Outliers</i> 1 .....	64
Tabel 4.6 Identifikasi Data <i>Outliers</i> 3 .....	65
Tabel 4.7 Identifikasi Data <i>Outliers</i> 3 .....	65
Tabel 4.8 <i>One Sample</i> Kolmogorov-Smirnov .....	67
Tabel 4.9 Uji Multikolinearitas .....	68
Tabel 4.10 Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson.....	70
Tabel 4.11 Analisis Regresi .....	72
Tabel 4.12 Uji Koefisien Determinasi .....	75
Tabel 4.13 Uji F .....	76
Tabel 4.14 Uji t .....	77

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	43
Gambar 3.1 Uji Durbin-Watson .....	54
Gambar 4.1 Plot Grafik Uji Normalitas.....	66
Gambar 4.2 Statistik $d$ Durbin-Watson .....	69
Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas .....	71

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Corporate Governance* (CG) terhadap kinerja keuangan BUMN dan menguji perbedaan kinerja keuangan BUMN sebelum dan sesudah privatisasi. *Corporate Governance* diproksikan dengan variabel *board size*, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris utama dan jumlah komite audit.

Dari studi yang telah dilakukan oleh Galiani et. al (2003) menyatakan bahwa di Indonesia secara rata-ratalima pemegang saham terbesar memegang kontrol 57% sampai dengan 67% dari saham-saham perusahaan. Komisaris pada umumnya tidak efektif dalam menjaga kepentingan-kepentingan para pemegang saham oleh karena posisi yang dominan. Struktur kepemilikan korporasi yang demikian sempit dan mempunyai hubungan historis yang erat dengan pejabat pemerintah telah menghambat diberlakukannya sistem hukum yang efisien dan *fair* (Sam'ani, 2008).

Konsentrasi kepemilikan ini menimbulkan resiko dalam *corporate governance*. Melalui kepemilikan mayoritas di dalam BUMN pemerintah juga merupakan pelaku utama didalam ekonomi Indonesia. Sementara beberapa dari BUMN yang besar dan dikelola dengan baik telah sukses dengan *go public*, beberapa yang lain masih berusaha keras memperbaiki kinerja keuangan digambarkan, tingkat pengembalian

aset yang rendah, tingkat keuntungan pada total penjualan sangat rendah, serta terus-menerus mengalami kerugian (Suhardjanto dan Apreria, 2010)

Metode penilaian kinerja yang digunakan selama ini, yaitu penilaian kinerja perusahaan dengan ukuran keuangan dan non keuangan. Sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu mencari laba, maka hampir semua perusahaan mengukur kinerjanya dengan ukuran keuangan. Pengukuran dengan aspek keuangan lebih sering digunakan karena ada standar pembandingan yang potensial, baik berupa laporan keuangan dimasa lalu atau dengan laporan keuangan perusahaan lain yang sejenis (Hansen dan Mowen, 1997).

Laporan keuangan, dalam hubungannya dengan kinerja sering dijadikan dasar penilaian kinerja perusahaan karena dengan melihat laporan keuangan dapat diukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu (Ujiyantho et. al, 2007). Namun, seringkali besaran laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan, sehingga laba yang tinggi belum tentu mencerminkan kas yang besar (Theresia, 2005). Dalam hal seperti ini, penggunaan arus kas mempunyai nilai lebih untuk menjamin kinerja perusahaan di masa datang karena arus kas (*cash flow*) menunjukkan hasil operasi yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai dan benar-benar sudah dikeluarkan oleh perusahaan (Pradono dan Cristiawan, 2004).

Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar. Hasil dari kinerja tersebut



harus dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik perusahaan. Perusahaan yang mempunyai kinerja yang bagus akan terjamin kelangsungan hidupnya karena akan mendapat kepercayaan dari publik, sehingga publik akan merasa nyaman untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Untuk mengetahui bagaimana kinerja yang dicapai oleh suatu perusahaan perlu dilakukan penilaian kinerja (Lingle dan Schiemann, 1996).

Metode penilaian kinerja yang digunakan selama ini, yaitu penilaian kinerja perusahaan dengan ukuran keuangan dan non keuangan. Sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu mencari laba, maka hampir semua perusahaan mengukur kinerjanya dengan ukuran keuangan. Pengukuran dengan aspek keuangan lebih sering digunakan karena ada standar pembandingan yang potensial, baik berupa laporan keuangan dimasa lalu atau dengan laporan keuangan perusahaan lain yang sejenis (Hansen dan Mowen, 1997).

Penelitian ini menggunakan *Net Profit Margin* = NPM sebagai alat pengukur kinerja keuangan perusahaan. *Net Profit Margin* dihitung dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Salah satu alasan menggunakan laba sebagai alat pengukur kinerja karena laba (NPM) lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja keuangan perusahaan dan tidak terikat dengan harga saham (Hansen dan Mowen, 1997).

Kinerja perusahaan negara atau BUMN selama ini sering mendapat sorotan kritis dari masyarakat. BUMN dipandang sebagai badan usaha yang tidak efisien, karena boros dalam pemanfaatan sumber daya, sarat dengan korupsi, serta memiliki

profitabilitas rendah. Kritik ini cukup beralasan apabila dilihat dari perkembangan kinerja BUMN yang belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, meskipun terdapat pula BUMN yang memiliki kinerja sangat baik. Argumen yang sering digunakan sebagai penjelasan atas belum optimalnya kinerja BUMN adalah tujuan pendiriannya yang lebih diprioritaskan pada pemberian pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dibandingkan perolehan laba.

Kinerja BUMN yang relatif rendah tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena akan semakin tertinggal dan sulit untuk bersaing dengan perusahaan swasta sejenis. Terlebih lagi bila keberadaan BUMN ditempatkan dalam tata perekonomian dunia dewasa ini yang semakin mengglobal dan seakan-akan tanpa batas (*borderless nation*), dimana BUMN tidak hanya bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta di tingkat domestik, namun juga bersaing dengan perusahaan-perusahaan transnasional dari berbagai negara maju. Kinerja BUMN yang rendah secara langsung ataupun tidak langsung akan berdampak pada kesejahteraan rakyat, mengingat salah satu perannya adalah sebagai penyedia *public goods*, berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Disamping itu peran BUMN juga menyediakan input seperti listrik, gas bumi, air, minyak dan lainnya untuk kepentingan dunia usaha. BUMN memang telah mampu memainkan peran untuk memenuhi kebutuhan dan hajat hidup masyarakat, tetapi peran tersebut dicapai dengan biaya yang sangat tinggi atau tidak efisien (Kantor Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN/Badan Pengelola

BUMN, 1998). Inefisiensi pengelolaan BUMN jika dibiarkan berlangsung maka akan menjadi beban bagi masyarakat, karena harus membayar harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya untuk mendapatkan barang dan jasa yang disediakan oleh BUMN.

Optimalisasi BUMN dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu peningkatan restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi. Privatisasi yang dimulai dengan restrukturisasi dan profitisasi masih diperlukan dalam rangka untuk mengurangi beban defisit anggaran negara dan sekaligus meningkatkan efisiensi produksi BUMN. Dengan kedudukannya yang penting tersebut, maka upaya privatisasi beserta fase-fasenya perlu dipercepat dan ditingkatkan.

Privatisasi adalah kebijakan yang paling populer dibandingkan dua alternatif kebijakan lain yang dipromosikan pemerintah untuk memperbaiki kinerja BUMN, yaitu restrukturisasi dan profitisasi. Kebijakan tersebut sampai saat ini masih sering menjadi kontradiksi, di mana terdapat pihak-pihak yang bersifat pro maupun kontra. Pihak yang pro memandang privatisasi sebagai suatu solusi bagi pemerintah untuk mengatasi defisit APBN dan sekaligus dapat meningkatkan kinerja BUMN secara bertahap. Sedangkan pihak yang kontra memandang privatisasi sebagai upaya untuk menggadaikan “nasionalisme”, khususnya untuk privatisasi BUMN yang sebagian sahamnya dijual kepada pihak asing dalam proporsi yang cukup signifikan. Contoh yang paling nyata dan beberapa waktu lalu banyak mengundang polemik adalah privatisasi PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

Kontradiksi atau polemik yang timbul seputar privatisasi pada dasarnya dilandasi oleh pengamatan empirik atas pengalaman pelaksanaan privatisasi yang perlu dilakukan secara cermat, baik dari segi metode maupun waktunya, agar dapat dihasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus ditanggung. Fahy et al. (2003) dan Savas (2000) misalnya mengemukakan bahwa privatisasi dapat mendorong keunggulan daya saing, tetapi transformasi dari perusahaan negara melalui privatisasi belum sepenuhnya dapat menjamin tercapainya kondisi tersebut. Lebih tegas lagi, Stiglitz (2001) menyoroti efek negatif dari privatisasi yang tidak saja berdampak buruk terhadap kegagalan pasar (market failure) dan penurunan kinerja namun lebih jauh pada terganggunya kesejahteraan masyarakat.

Stiglitz dalam analisisnya banyak mempersoalkan kasus korupsi yang kerap terjadi saat dilangsungkannya privatisasi, yaitu dimulai dari tahap tender, proses, maupun pada saat penjualan aset negara tersebut.

Saat *Intial Public Offering* (IPO) di pasar modal, yang merupakan saat yang penting bagi perusahaan BUMN dimana penilaian investor terhadap kondisi dan prospek perusahaan akan menentukan besarnya dana yang dapat diakumulasi oleh perusahaan dari pasar modal (Lilis Setiawati, 2002). Informasi yang pasti tersedia bagi investor untuk menilai perusahaan pada saat melakukan IPO adalah laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan diharapkan mampu mencerminkan kondisi perusahaan yang riil.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan privatisasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan, namun menurut Taylor et. al, (1998) dapat diklasifikasikan menjadi empat faktor. Faktor pertama masalah ideologi yang pada intinya menitikberatkan bahwa semua aktivitas ekonomi harusnya diserahkan kepada sektor swasta. Ideologi dapat menjadi pendorong yang kuat untuk dilaksanakannya privatisasi. Faktor kedua adalah akuntabilitas yang dilandasi oleh gagasan bahwa sektor swasta lebih memiliki rasa tanggung jawab kepada publik, sebagai konsekuensi dari lebih diperhatikannya aspek kepercayaan dan kredibilitas, karena pola hubungan bisnis yang spesifik. Faktor ketiga adalah masalah efisiensi, di mana pada banyak kasus sektor publik lebih lamban dalam membuat keputusan dan seringkali menciptakan ketidakpastian. Kondisi ini berbeda dengan sektor swasta yang pembuatan keputusannya relatif harus lebih cepat, lebih besar, meskipun dengan mempertimbangkan berbagai risiko. Faktor keempat adalah pembiayaan, yaitu privatisasi dimaksudkan oleh pemerintah untuk mendapatkan dana segar untuk memperbaiki fasilitas guna meningkatkan kinerja keuangan.

Dari sudut pandang kebijakan publik, privatisasi menurut sebagian peneliti, misalnya Guisllain (1997) dan Porter (1980), masih menjadi dilema untuk dijalankan pemerintah. Timbulnya dilema dikarenakan privatisasi mempunyai dampak yang luas dan tidak hanya membawa konsekuensi ekonomi, namun juga sosial dan politik. Keduanya menyatakan privatisasi menurunkan kinerja perusahaan apabila tidak dilakukan dengan persiapan yang bagus. Di berbagai negara, dorongan terhadap

pelaksanaan privatisasi sangat kuat dipengaruhi oleh publik, terutama stakeholder dari perusahaan milik negara itu sendiri (Savas, 2000 dan Cowan, 1990). Dorongan yang kuat tersebut dilandasi oleh kepentingan stakeholder untuk meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan kontribusi secara internal dalam bentuk perbaikan kinerja perusahaan dan kesejahteraan karyawan maupun secara eksternal bagi penerimaan negara.

Brich et. al, (2000) melakukan penelitian pengaruh privatisasi di dua dekade terakhir di Argentina, Chile, Brazil, Colombia, Mexico, Peru, Venezuela dan negara Caribbean. Hasil penelitian menunjukkan bahwa privatisasi mempunyai pengaruh positif pada kinerja perusahaan dan berpengaruh negatif pada tenaga kerja. Pengaruh privatisasi terhadap tenaga kerja bersifat negatif karena langkah yang sering ditempuh dalam privatisasi adalah pengurangan pegawai.

Kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah *corporate governance*. Sejak krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 isu mengenai *corporate governance* telah menjadi salah satu bahasan penting yang menarik (Suhardjanto dan Apreria, 2010).

Mekanisme *good corporate governance* memiliki beberapa indikator yang berupa komite audit, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan latar belakang pendidikan komisaris. Banyak penelitian yang dilakukan untuk menguji keterkaitan antara mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian terdahulu lainnya yang telah dilakukan untuk menguji

keterkaitan antara mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan tidak ada hubungan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan (Daily et. al, 1998). *Corporate governance* tidak mempengaruhi kinerja secara langsung terutama. Di lain pihak menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai *poor perfomance* disebabkan oleh *poor governance*, adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan nilai/kinerja perusahaan (antara lain, Black et. al, 2003; Klapper dan Love, 2002; Mitton, 2000; dan Darmawati et. al, 2004).

Mitton (2000) menyatakan bahwa perbedaan hasil penelitian tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : 1) perspektif teoritis yang diterapkan 2) metodologi penelitian, 3) pengukuran kinerja, dan 4) perbedaan pandangan atas keterlibatan dewan dalam pengambilan keputusan. Walaupun penelitian-penelitian tentang hubungan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan menunjukkan hasil yang berbeda, namun semuanya menyatakan bahwa *corporate governance* mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap kinerja perusahaan.

Untuk ukuran perusahaan, ada beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa adanya pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat ditentukan dengan beberapa hal, antara lain : total penjualan, total aset, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata total aset dimana mempengaruhi kinerja tapi tidak secara langsung. (ferri dan jones, 1979). Selain hal tersebut ada penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa secara umum perusahaan yang

mempunyai total aset yang relatif besar dapat beroperasi dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang total aset rendah. Oleh karena itu perusahaan dengan total aset besar lebih mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi (dalam Arrayani, 2003). Dalam pengertian bahwa perusahaan yang memiliki peralatan modern, fasilitas bagus serta sarana memadai akan lebih tinggi kinerjanya dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan kecil atau dengan kata lain mempunyai aset kecil. Sedangkan Herni et. al (2008) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak ada pengaruh secara langsung terhadap kinerja perusahaan, dengan meningkatkan ukuran perusahaan tidak dapat secara langsung meningkatkan kinerja keuangan.

Aspek *corporate governance* yang sudah banyak diteliti adalah dewan komisaris dan komite audit. Penelitian terdahulu belum banyak mengkaitkan latar belakang pendidikan presiden komisaris (komisaris utama) terhadap kinerja keuangan perusahaan, terlebih perusahaan BUMN. Variabel ini cukup layak untuk dimasukkan dalam model , Oleh karena itu, penulis menyimpulkan judul yang sesuai untuk penelitian ini adalah **“ANALISIS PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *PRIVATISASI* TERHADAP KINERJA KEUANGAN: Studi Pada BUMN Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (BEI)”**

## **1.2. Perumusan Masalah**



Kinerja perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kinerja keuangan yang dapat diukur menggunakan rasio profitabilitas. Galiani et. al, (2003) menguji perbaikan indikator kinerja setelah privatisasi pada 21 perusahaan non financial dan seluruh bank yang diprivatisasi di Argentina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan nonfinansial meningkat 188 persen setelah privatisasi. Rani Handayani (2009) terdapat pengaruh penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap rasio profitabilitas perusahaan *go public* di Indonesia. Seniwati (2008) menyimpulkan total aset sebagai indikator ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap NPM sebagai indikator kinerja keuangan.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa variabel yaitu komite audit, *board size*, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan, privatisasi, ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan. Komite audit, *board size*, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan, menjadi indikator mekanisme *good corporate governance*. Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian terdahulu diambil *research gap* yaitu:

1. Adanya perbedaan hasil penelitian pada Black et. al, 2003; Klapper dan Love, 2002; Mitton, 2000; dan Darmawati et. al, 2004 dengan Daily et. al (1998) yang mengukur pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan NPM.

2. Adanya perbedaan hasil penelitian pada Ferri et. al, (1979); Seniwati (2008), Arrayani (2003) dengan Herni et. al, (2008) yang mengukur pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan NPM.
3. Adanya perbedaan hasil penelitian pada; Galiani et. al.(2003), Brich et. al, (2000) dengan, Guisllain (1997), Porter (1980) dan Stiglitz (2001) yang mengukur pengaruh privatisasi terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Atas *gap* yang muncul, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris ( *board size*) sebagai indikator dari mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap NPM ?
2. Bagaimana pengaruh proporsi komisaris independen sebagai indikator dari mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap NPM ?
3. Bagaimana pengaruh latar belakang pendidikan komisaris sebagai indikator dari mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap NPM ?
4. Bagaimana pengaruh komite audit sebagai indikator dari mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap NPM ?
5. Bagaimana pengaruh privatisasi terhadap NPM ?
6. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap NPM ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris ( *board size*) sebagai indikator dari mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap NPM ?
2. Menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen sebagai indikator dari mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap NPM ?
3. Menganalisis pengaruh latar belakang pendidikan komisaris sebagai indikator dari mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap NPM ?
4. Menganalisis pengaruh komite audit sebagai indikator dari mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap NPM ?
5. Menganalisis pengaruh privatisasi terhadap NPM ?
6. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap NPM ?

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan akademik, pemerintah, manajemen BUMN, maupun peneliti lain.

##### **1. Bagi Investor**

Penelitian ini akan memberikan kontribusi bahan kajian mengenai kinerja keuangan BUMN di Indonesia dalam kaitannya dengan faktor penentu investasi yaitu *corporate governance* dan privatisasi.

##### **2. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini akan memberikan kontribusi kepada pemerintah selaku penentu kebijakan publik dalam kaitannya dengan pengambilan kebijakan mengenai privatisasi dan penerapan *corporate governance*, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan BUMN di Indonesia.

### 3. Bagi Manajemen BUMN

Penelitian ini akan memberikan sumbangan kepada Manajemen BUMN untuk dapat merencanakan pengembangan perusahaan, sehingga BUMN dapat dikelola secara profesional menjadi perusahaan yang berkinerja tinggi.

### 4. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan kepada peneliti berikutnya yang akan mengkaji mengenai perkembangan masalah privatisasi dan *corporate governance* di Indonesia.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran penulisan dalam penelitian ini, berikut ini merupakan sistematika penulisan yang berisi informasi umum yang akan dibahas di setiap babnya.

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup subbab Latar Belakang Masalah mengenai profitabilitas, *good corporate governance* yang berupa proporsi komisaris independen, *board size*, *culture* komisaris utama, tingkat pendidikan komisaris utama dan privatisasi;

Rumusan Masalah yang menjelaskan mengenai *research gap* dan *research question*;  
 Tujuan Penelitian dalam menganalisis pengaruh antar variabel dalam penelitian ini;  
 Manfaat Penelitian bagi pengembangan akademik, pemerintah, majemen BUMN dan peneliti lain

## **BAB II TELAAH PUSTAKA**

Bab ini mencakup subbab Landasan Teori mencakup *good corporate governance*, komite audit, proporsi komisaris independen, *board size*, latar belakang pendidikan komisaris utama, privatisasi, ukuran perusahaan dan NPM; Hubungan Antar Variabel yaitu hubungan antara mekanisme *good corporate governance* komite audit, proporsi komisaris independen, *board size*, latar belakang pendidikan komisaris utama, privatisasi, ukuran perusahaan dan NPM, Penelitian Terdahulu yang mencakup 10 penelitian yang mendasari penelitian ini; Kerangka Pemikiran yang menjelaskan hubungan antar variabel; Perumusan Hipotesis yang merumuskan asumsi hipotesis dalam penelitian ini.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini mencakup subbab Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel yang menjelaskan seputar penggunaan proksi dalam variabel penelitian; Populasi dan Penentuan Sampel dengan menjelaskan penggunaan populasi pada perusahaan manufaktur dan penentuan kriteria dalam penentuan sampel; Jenis dan Sumber Data; Teknik Pengumpulan Data; Metode Analisis yang mencakup uji asumsi klasik seperti identifikasi outlier, uji heterokedastisitas, uji normalitas, uji

multikolinieritas, dan uji autokorelasi, serta uji hipotesis yang meliputi koefisien determinasi, uji statistik F dan uji statistik t.

#### **BAB IV HASIL DAN ANALISIS**

Bab ini mencakup subbab Deskripsi Objek Penelitian mengenai gambaran umum lingkup BUMN selama periode pengamatan, perhitungan variabel dependen, serta statistik deskriptif keseluruhan variabel; Analisis Data yang meliputi indentifikasi outlier, uji heterokedastisitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi; Pengujian Hipotesis yang meliputi koefisien determinasi, uji statistik F dan uji statistik t; Interpretasi Hasil yang memberikan gambaran mengenai hasil penelitian.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini mencakup subbab Simpulan yang menjelaskan ringkasan hasil penelitian, Keterbatasan yang menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi hasil penelitian, dan Saran yang diperuntukkan bagi pengembangan akademik, pemerintah, manajemen BUMN dan peneliti lain.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

Bab ini berisi landasan teori utama, landasan teori pendukung yang disajikan dalam beberapa bagian dan ringkasan penelitian sebelumnya. Bagian pertama mengenai kinerja keuangan BUMN, bagian kedua mengenai privatisasi, bagian ketiga membahas mengenai *corporate governance*, bagian keempat mengenai kerangka pemikiran dan bagian kelima penurunan hipotesis.

##### **2.1.1. Pengertian Kinerja Keuangan BUMN**

Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Kinerja perusahaan hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu perusahaan dari berbagai ukuran yang disepakati. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui kinerja yang dicapai. Kata penilaian sering diartikan dengan kata *assessment*. Penilaian kinerja perusahaan (*Companies performance assessment*) mengandung makna suatu proses atau sistem penilaian mengenai pelaksanaan kemampuan kerja suatu perusahaan (organisasi) berdasarkan standar tertentu (Kaplan dan Norton, 1996).

Menurut Alexandri (2008: 200) *Net Profit Margin* (NPM) adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak.

Menurut Bastian dan Suhardjono (2006: 299) *Net Profit Margin* adalah perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, maka dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. Hubungan antara laba bersih sesudah pajak dan penjualan bersih menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengemudikan perusahaan secara cukup berhasil untuk menyisakan margin tertentu sebagai kompensasi yang wajar bagi pemilik yang telah menyediakan modalnya untuk suatu resiko. Hasil dari perhitungan mencerminkan keuntungan netto per rupiah penjualan. Para investor pasar modal perlu mengetahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Dengan mengetahui hal tersebut investor dapat menilai apakah perusahaan itu *profitable* atau tidak.

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor- faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba hanya dilihat dari rasio keuangan. Rasio keuangan yang mempengaruhi pertumbuhan laba pada perusahaan Haryanti (2007) antara lain *Total Aset Turnover*, *Net Profit Margin* dan *Return On Investment*.

Untuk dapat menginterpretasikan hasil perhitungan rasio keuangan, maka diperlukan adanya pembandingan. Ada dua metode pembandingan rasio keuangan perusahaan menurut Syamsuddin (2000 : 39) yaitu:

a. *Cross-sectional approach*



*Cross-sectional approach* adalah suatu cara mengevaluasi dengan jalan membandingkan rasio-rasio antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya yang sejenis pada saat yang bersamaan

b. *Time series analysis*

*Time series analysis* dilakukan dengan jalan membandingkan rasio-rasio finansial perusahaan dari satu periode ke periode lainnya

Kinerja keuangan BUMN dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Hal ini antara lain dapat dilihat dari peningkatan perolehan laba bersih setelah pajak (*net income*) dibagi penjualan setiap tahunnya. Hingga akhir tahun 2006, mengacu pada UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, jumlah BUMN yang dimiliki oleh Pemerintah RI adalah sebanyak 139 BUMN yang terdiri dari 13 BUMN berbentuk Perum, 114 berbentuk Persero, dan 12 berbentuk Persero Terbuka.

## **2.1.2 Privatisasi**

### **2.1.2.1 Definisi Privatisasi**

Privatisasi mempunyai pengertian yang luas. Beberapa definisi privatisasi dikemukakan antara lain oleh Savas (1987): “*Privatization is the act of reducing the role government, or increasing the role of private sector, in activity or in the ownership of assets.*” Berdasarkan definisi tersebut, setiap kebijakan yang mengurangi peran pemerintah dan memberikan kesempatan pada peran swasta adalah merupakan kebijakan privatisasi. Dengan menggunakan definisi Savas, kebijakan deregulasi dapat dianggap sebagai tindakan privatisasi, karena

deregulasi juga bertujuan mengurangi peranan pemerintah dan memperkuat eksistensi pasar. Definisi Savas dianggap sebagai definisi yang bersifat luas tentang privatisasi.

Prawirasantosa, Setyanto (2007) menurutnya privatisasi adalah salah satu cara efektif memperbaiki kinerja BUMN dari faktor internal dan eksternal perusahaan tersebut, sehingga banyak perusahaan terutama BUMN melakukan privatisasi untuk memperbaiki kinerja perusahaan.

Menurut pasal 1 butir 12 UU 19 No. 2003 tentang BUMN yang dimaksud dengan privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Ada dua pendekatan dalam privatisasi:

#### **2.1.2.2. The Property Right Approach**

Pendekatan ini mengeksplorasi perbedaan antara perusahaan publik dan swasta. Struktur ekonomi yang didominasi negara berbeda dengan struktur ekonomi yang didominasi swasta dalam kaitannya dengan fungsi maksimisasi.

Pada struktur ekonomi dominasi negara, organisasi yang dimiliki negara dipengaruhi dan dikontrol oleh kelompok-kelompok politisi, menteri, dan manajer publik. Masing-masing economic agent memandang kepentingan publik sesuai dengan kepentingannya atau kepentingan kelompoknya. Selain itu, dalam organisasi yang dimiliki negara, nontransferability right pada keuntungan yang akan datang (future benefit) dan tidak adanya residual claims pada income

perusahaan negara memperlemah hubungan antara usaha individual dengan reward.

Pada struktur ekonomi yang didominasi swasta, pemilik (*shareholders*) perusahaan swasta akan memaksimalkan nilai organisasi dengan memastikan bahwa agent (manajer) akan mengalokasikan sumber daya pada *utilitas* maksimal. Kemampuan dan kemauan pemilik untuk mentransfer hak kepemilikan (*ownership rights*) akan menyebabkan realokasi sumberdaya dari utilitas rendah ke utilitas tinggi. Penulis *Property Right Theory*, seperti Jensen dan Meckling (1976), dan Boycko et al (1996) menunjukkan bahwa semakin meluasnya struktur kepemilikan dalam ekonomi akan menyebabkan semakin tingginya kemungkinan sumberdaya dialokasikan, hal ini sangat tergantung pada seberapa jauh ekonomi menerapkan *market-based system*.

Literatur di bidang ekonomi menunjukkan bahwa perbedaan kepemilikan akan menyebabkan perbedaan dorongan ekonomi yang berbeda dan pada akhirnya menyebabkan output ekonomi yang berbeda. Perusahaan swasta adalah perusahaan yang dimiliki oleh individual yang bebas, dalam keterbatasan peraturan, untuk memiliki, menggunakan dan menukar pada hak kepemilikan swasta terhadap aset. Hak tersebut memberikan pemilik individual residual claims pada aset dari perusahaan swasta. Ketika aset tersebut digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimana konsumen meminta pada biaya yang lebih rendah dibanding harga pasar, maka terjadi peningkatan income dan kesejahteraan pemilik. Sebaliknya jika biaya produksi melebihi harga pasar, kerugian terjadi dan nilai perusahaan serta kesejahteraan dan income pemilik aset perusahaan

menurun. Pemilik perusahaan swasta memperoleh keuntungan dari manajemen yang efisien dan menanggung kerugian ketika manajemen tidak efisien. Pemilik perusahaan swasta dihadapkan pada *bottom line* yang mengukur klaim pemilik.

Insentif tercipta oleh *private property right* dengan menghubungkan antara hasil yang didapat dari penggunaan aset dan kesejahteraan dan income pemilik. Pemilik perusahaan swasta mempunyai insentif untuk memonitor manajer dan pekerja di perusahaan, sehingga permintaan konsumen dipenuhi dengan cara yang *cost effective* sepanjang waktu. Adanya monitoring yang baik, manajer swasta tidak ada dorongan untuk melakukan tindakan yang melalaikan kewajibannya dan melakukan tindakan yang tidak konsisten dengan usaha memaksimalkan kesejahteraan pemilik. Dengan kata lain, *private property rights* menimbulkan dorongan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan.

Sebaliknya, perusahaan publik tidak dimiliki oleh individual yang memiliki residual claims pada aset organisasi. Pemilik nominal perusahaan publik (*the nominal owners of public enterprises, the taxpayer-owner*) tidak dapat menjual dan membeli aset tersebut, sehingga mereka tidak mempunyai dorongan yang kuat untuk memonitor perilaku manajer publik dan pekerja publik.

*Taxpayer-owner* dapat memperoleh keuntungan dari peningkatan efisiensi perusahaan publik melalui pengurangan pajak. Tetapi keuntungan tersebut akan dibagikan pada semua taxpayer sehingga keuntungan individual kecil.

Biaya individual untuk memperoleh keuntungan tersebut, akan tinggi untuk memperoleh informasi, monitor pekerja publik, dan organisasi kekuatan politik yang efektif untuk memodifikasi perilaku manajer dan pekerja. Manajer

dan pekerja publik mengalokasikan aset yang bukan miliknya, sehingga tidak menanggung biaya pada keputusannya, dan tidak memperoleh keuntungan dari perilaku yang efisien. Pemilik perusahaan publik tidak mempunyai dorongan yang kuat untuk memonitor kinerja manajer dan pekerja, sehingga manajer cenderung melalaikan kewajibannya dan berperilaku tidak memaksimalkan kesejahteraan pemilik atau cenderung berlaku moral hazard.

Perusahaan swasta dan publik harus mempunyai rencana. Meskipun perencanaan pada perusahaan publik berbeda dengan perusahaan swasta. *Public plan* dikembangkan oleh manajer dan pekerja yang tidak menanggung biaya kesalahan dan *future benefit* yang dihasilkan perusahaan. Lebih lanjut, *public plans* dikembangkan oleh orang yang tidak harus menjawab pertanyaan pemilik.

Sepanjang aturan perencanaan dan prosedur diikuti, perencanaan publik dinilai memiliki perencanaan yang baik. Perencanaan swasta berbeda, dimana *private plan* berusaha mengantisipasi permintaan konsumen dan biaya produksi secara tepat karena *present value* dari perusahaan swasta tergantung pada ketepatan mengantisipasi permintaan dan biaya. Perencana perusahaan swasta harus menjawab pertanyaan pemilik yang mengawasi nilai perusahaan yang dimiliki.

Dari pandangan teoritis, perusahaan swasta yang didasarkan pada *private property rights*, cenderung lebih efisien dibanding perusahaan publik. Beberapa penelitian empiris mendukung pendapat ini. Misalnya '*bureaucratic rule of two*' menyatakan bahwa biaya perusahaan publik untuk memproduksi kualitas dan kuantitas barang dan jasa mencapai dua kali dibanding perusahaan swasta.

Dengan kata lain, sebagai *rule of thumb*, privatisasi perusahaan publik akan memotong biaya sebesar setengahnya.

### **2.1.2.3. Public Choice Approach**

*Public choice approach* memberikan analisis yang lebih luas dibanding *property right*. *Public choice approach* mengasumsikan bahwa politisi, birokrat, dan manajer perusahaan publik lebih mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitasnya. Pendekatan ini mengasumsikan politisi mementingkan kepentingannya sendiri untuk mencapai tujuan ideologis atau personal dengan batasan tidak kehilangan posisi pada pemilu berikutnya. Bagi politisi, tetap berada dalam kekuasaan adalah tujuan yang utama, sehingga politisi akan menggunakan public utilities untuk tujuan pribadinya. Hal ini terlihat pada tidak adanya dorongan bagi politisi untuk melakukan kontrol yang efektif untuk penggunaan sumberdaya negara dan efisiensi perusahaan publik.

*Public utilities* memberikan kesempatan bagi politisi untuk mencapai kepentingan pribadinya, yaitu terpilih kembali pada pemilu selanjutnya dengan cara penambahan tenaga kerja dan *stabilisasi purchasing power*. Jika ‘*misuse*’ dari *public utilities* menyebabkan meningkatnya angka tenaga kerja dan pendapatan dalam kurun waktu tertentu, maka sangat mudah bagi pemerintah untuk dapat dipilih kembali dalam pemilihan selanjutnya. Biaya-biaya dari kebijakan yang ‘*misuse*’ tersebut akan tampak beberapa tahun setelahnya, yaitu adanya defisit pada keuangan perusahaan publik yang kemudian memerlukan campur tangan pemerintah dengan subsidi, yang pada akhirnya akan meningkatkan defisit anggaran negara.

### **2.1.3. *Good Corporate Governance***

#### **2.1.3.1 Definisi *Good Corporate Governance***

Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 telah mengeluarkan Pedoman *Corporate Governance* (CG) yang pertama. Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2001. Berdasarkan pemikiran bahwa suatu sektor ekonomi tertentu cenderung memiliki karakteristik yang sama, maka pada awal tahun 2004 dikeluarkan Pedoman *Corporate Governance* Perbankan Indonesia dan pada awal tahun 2006 dikeluarkan Pedoman *Corporate Governance* Perasuransian Indonesia.

Definisi *corporate governance* dirumuskan oleh Jill et. al, (2005), pada bukunya yang berjudul *Corporate Governance and Accountability*, yaitu *corporate governance* adalah sistem pengawasan dan keseimbangan baik internal maupun eksternal kepada perusahaan, yang menjamin bahwa perusahaan akan melaksanakan kewajibannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) dan bertindak dengan tanggung jawab sosial dalam segala bidang dari bisnis perusahaan yang bersangkutan.

Dengan bisa terukurnya praktik *corporate governance* di tingkat perusahaan, banyak penelitian yang berhasil menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan nilai/kinerja perusahaan (antara lain, Black et. al, 2003; Klapper et. al, 2002; Mitton, 2000; dan Darmawati et. al, 2004). Penelitian-penelitian tersebut secara tidak langsung juga menunjukkan kegunaan

(*usefulness*) dari pemeringkatan praktik *corporate governance* di tingkat perusahaan yang sudah dilakukan di beberapa negara (termasuk Indonesia).

#### **2.1.3.2. Prinsip *Good Corporate Governance***

Tujuan utama dari pengelolaan perusahaan yang baik adalah untuk memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya melalui peningkatan nilai pemilik saham secara maksimal (Emirzon, 2007). Dalam kaitan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya *Corporate Governance*, maka OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) telah mengembangkan prinsip *Good Corporate Governance* dan dapat diterapkan secara luwes sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi dari masing-masing negara sebagaimana yang telah dijabarkan oleh *Organisazation for Ekonomik Corporation and Development* (*OEDC*) dalam Wilson Arafat (2008). Prinsip-prinsip tersebut yaitu :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham: Kerangka yang dibangun dalm GCG harus mampu melindungi hak-hak pemegang saham. Hak-hak tersebut meliputi hak dasar pemegang saham, yaitu untuk menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan, mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya, memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur, ikut berperan dan memberi suara dalam RUPS, memilih anggota dewan komisaris dan direksi, serta memperoleh pembagian keuntungan perusahaan.



- b. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham: Kerangka GCG harus menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini juga mengisyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham-saham yang berada pada satu kelas, melarang praktek *insider* trading dan *self dealin*, dan mengharuskan anggota dewan komisaris melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conlilct interest*).
- c. Peranan *stakeholder* yang terkait dengan perusahaan: Kerangka GCG harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stekeholder*, seperti yang ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dengan *stakeholder* dalam rangka penciptaan kesejahteraan, lapangan kerja dan kesinambungan usaha.
- d. Keterbukaan dan Transparasi: Kerangka GCG harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.
- e. Akuntabilitas dewan komisaris: Kerangka GCG harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan

komisaris beserta kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

Pelaksanaan *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan investor ( dalam Trinanda et. al, 2010)

Terdapat dua macam struktur *corporate governance* yang berkaitan dengan struktur dewan perusahaan, pertama model *Anglo-Saxon* atau *single board model* dan yang kedua model *Continental Europe* atau *two tiers system* (FCGI, 2002). Menurut FCGI (2002), perusahaan di Indonesia menerapkan *two-board system* atau *two-tier board system* seperti kebanyakan perusahaan di Eropa. Menurut FCGI (2002), dalam model *two-board system*, RUPS merupakan struktur tertinggi yang mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris yang mewakili pemegang saham untuk melakukan fungsi kontrol atas manajemen. Dalam model ini hanya ada perbedaan dalam kedudukan dewan komisaris yang tidak langsung membawahi dewan direksi.

FCGI (2002) menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang mengawal pelaksanaan strategi, mengawasi manajemen, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan.

#### 2.1.4 Board Size

Dewan komisaris adalah adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). Perusahaan akan bergantung pada dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik sehingga dapat meningkatkan profitabilitas. (Sutojo et. al, 2006).

*Board of directors* atau dewan komisaris memiliki dua fungsi utama di dalam sebuah perusahaan. Fungsi servis berarti bahwa dewan komisaris dapat memberikan konsultasi dan nasihat kepada manajemen. Kedua, fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris (dalam teori agensi) mewakili mekanisme internal utama untuk mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga dapat membantu menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer (FCGI, 2002). *Board of directors* atau dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* (FCGI, 2002). Berdasarkan kerangka hukum yang ada di Indonesia, fungsi *independent directors* pada *single board system* dapat direpresentasikan dengan fungsi dewan komisaris pada *two-board system* (Herwidayatmo, 2000). Sistem pengawasan pada perusahaan di Indonesia terletak di dewan komisaris. Oleh karena itu, peran *board of Commisioner* menjadi penting terkait dengan terwujudnya tata kelola (*governance*) perusahaan yang efektif.

Keefektifan peran pengawasan oleh dewan komisaris ini didukung dengan keberadaan komisaris independen dalam komposisi dewan komisarisnya (FCGI, 2002). Keberadaan komisaris independen diatur dalam ketentuan Peraturan

Pencatatan Efek Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2000.

Kerugian dari jumlah dewan yang besar berkaitan dengan dua hal, yaitu: meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan semakin meningkatnya jumlah dewan dan turunnya kemampuan dewan untuk mengendalikan manajemen, sehingga menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara manajemen dan kontrol (Jensen, 1993).

Perusahaan yang terdaftar di BEI wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proposional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

#### **2.1.5. Komite Audit**

Pengertian komite audit dalam Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004, tertanggal 24 September 2004 pada Peraturan nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Keberadaan komite audit pada saat ini telah diterima sebagai suatu bagian dari organisasi perusahaan (*Corporate Governance*). Bahkan untuk menilai pelaksanaan *good corporate governance* di perusahaan, adanya komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek dalam kriteria penilaian.

Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit dengan proporsi anggota eksternal yang cukup besar dan dengan pengetahuan serta pengalaman berkaitan dengan perusahaan dan keuangannya, diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja perusahaan ( dalam Syaiful Iqbal, 2007). Ukuran komite audit dijelaskan dalam keputusan Direksi BEJ nomor : KEP-399/BEJ/07-2001 Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Huruf C, yaitu keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota, seorang di antaranya merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu di antaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi atau keuangan (dalam Nurmala et. al, 2007).

#### **2.1.6. Komisaris Independen**

Komisaris adalah lembaga yang bertugas mengawasi atau mengontrol jalannya perusahaan yang dipimpin oleh dewan direksi (Emirzon, 2007). Disebutkan dalam Emirzon (2007), pembentukan Komisaris Independen ini dimotivasi oleh keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam PT terbuka. Berdasarkan keputusan Direksi BEJ (sekarang BEI) nomor: KEP-399/BEJ/07-2001 (dalam Nurmala et. al. 2007) yaitu Pencatatan Efek Nomor I-A, komisaris independen bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan.

Pelaksanaan *good corporate governance* terutama komisaris independent dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan investor ( dalam Trinanda et. al, 2010)

Proporsi komisaris independen sangat diperhitungkan. Seperti pada ketentuan di Pasar Modal dalam Surat Direksi PT. Bursa Efek Jakarta (sekarang BEI) nomor: KEP-399/BEJ/07-2001 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa poin C mengatur hal-hal mengenai Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan, yang menjelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), Perusahaan Tercatat wajib memiliki Komisaris Independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris (Emirzon, 2007).

#### **2.1.7. Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama.**

Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh komisaris utama berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (Ahmed at. al, 1994). Komisaris utama yang memiliki latar belakang pendidikan bisnis akan lebih baik dalam mengelola perusahaan dibandingkan dengan komisaris utama yang tidak memiliki pendidikan bisnis (Bray, et. al, 1995). Sedangkan Santrock (1995) menyatakan

bahwa seseorang berpendidikan tinggi akan memiliki jenjang karir lebih tinggi dan lebih cepat.

#### **2.1.8. Ukuran Perusahaan**

Salah satu tolok ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran perusahaan. Penentuan ukuran perusahaan dapat dinyatakan dengan total penjualan, total aset, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata tingkat aset. Faktor ukuran perusahaan yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan merupakan faktor penting dalam pembentukan laba. Perusahaan besar yang dianggap telah mencapai tahap kedewasaan merupakan suatu gambaran bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan kecil (dalam Seniwati, 2008).

Bagi perusahaan yang stabil biasanya dapat memprediksi jumlah keuntungan ditahun-tahun mendatang karena tingkat kepastian laba sangat tinggi. Sebaliknya bagi perusahaan yang belum mapan besar kemungkinan laba yang diperoleh juga belum stabil karena kepastian laba lebih rendah. ( Elisabeth, 1997)

#### **2.1.9. Kinerja Perusahaan**

Laba merupakan indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan. Laba berfungsi untuk mengukur efektivitas bersih dari sebuah usaha bisnis. Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari tingkat perolehan laba. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba

dalam hubungannya dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri (Herni et al, 2008).

Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja perusahaan baik dan pengawasan berjalan dengan baik, sedangkan dengan tingkat profitabilitas yang rendah menunjukkan bahwa kinerja perusahaan kurang baik, dan kinerja manajemen tampak buruk di mata principal.

## **2.2. Hubungan Antar Variabel**

### **2.2.1. Pengaruh *Board Size* Terhadap Tingkat Kinerja Keuangan.**

Terdapat peran penting *board of directors* dalam kinerja keuangan. Dewan komisaris yang efektif akan menentukan kinerja keuangan. Karakteristik dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan yang kecil sehingga nilai perusahaan yang memiliki dewan yang banyak lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki direksi lebih sedikit. Dalton et al (dalam Wardhani, 2006) Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

**H<sub>1</sub>: *Board size* berpengaruh positif terhadap tingkat kinerja keuangan.**



### **2.2.2. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Tingkat Kinerja Keuangan.**

Keberadaan komisaris independen atau anggota komisaris independen dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi dengan lebih luas kepada investor (Eng et. al, 2003). Komisaris independen lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan karena kepentingan mereka tidak terganggu oleh ketergantungan pada organisasi. Penelitian Suhardjanto et. al (2010) menemukan bahwa ada pengaruh positif proporsi komisaris independen terhadap kinerja keuangan.

Penelitian mengenai dampak dari independensi dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan ternyata masih beragam. Ada penelitian yang menyatakan bahwa tingginya proporsi dewan luar berhubungan positif dengan kinerja perusahaan (Daily et. al, 1993)

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

**H<sub>2</sub>: Proporsi *komisaris independen* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan**

### **2.2.3. Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama Dan Kinerja Keuangan Perusahaan.**

Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh komisaris utama berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (Ahmed et. al, 1994). Komisaris utama yang memiliki latar belakang pendidikan bisnis akan lebih baik dalam mengelola

perusahaan dibandingkan dengan komisaris utama yang tidak memiliki pendidikan bisnis (Bray et. al 1995). Sedangkan Santrock (1995) menyatakan bahwa seseorang berpendidikan tinggi akan memiliki jenjang karir lebih tinggi dan lebih cepat. Dari uraian diatas, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Latar belakang pendidikan komisaris utama berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.**

#### **2.2.4. Komite Audit Dan Kinerja Keuangan Perusahaan.**

Komite audit yang dipilih oleh komisaris diharapkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat secara efektif membatasi ruang gerak manajemen untuk melakukan manajemen laba. Selanjutnya dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit dengan proporsi anggota eksternal yang cukup besar dan dengan pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan perusahaan dan keuangannya, diharapkan dapat mengurangi praktik manajemen laba dalam perusahaan (Syaiful Iqbal, 2007).

Komite audit dianggap lebih efektif dalam memonitor laporan keuangan perusahaan sehingga diharapkan komite memiliki intensitas pertemuan yang cukup untuk dapat lebih baik dalam memonitor masalah seperti manajemen laba. Dengan intensitas pertemuan yang rutin, diharapkan akan menciptakan komunikasi yang baik dalam komite, sehingga komite akan semakin efektif dalam melakukan pengawasan dan mengurangi perilaku oportunistik manajemen seperti

praktek manajemen laba. Effendi (2005) menemukan bahwa komite audit tidak mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan. Namun Effendi (2005) menyimpulkan adanya peranan komite audit dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian. Sehingga dapat dikembangkan hipotesis:

**H<sub>4</sub>: Jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.**

#### **2.2.5. Privatisasi dan Kinerja Keuangan BUMN**

Galiani et. al, (2003) menguji perbaikan indikator kinerja setelah privatisasi pada 21 perusahaan non financial dan seluruh bank yang diprivatisasi di Argentina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan nonfinansial meningkat 188 persen setelah privatisasi.

Dengan semakin pentingnya privatisasi sebagai bagian dari kebijakan pemerintah, sebagian besar studi empiris privatisasi ini menyimpulkan bahwa kinerja perusahaan segera meningkatkan setelah privatisasi. (Harper, 2002)

Pada konteks Indonesia, terdapat beberapa penelitian mengenai privatisasi BUMN, antara lain: Adam (2008) menguji implikasi kebijakan privatisasi terhadap kinerja PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Kinerja PT Telekomunikasi Indonesia diukur dengan menggunakan data keuangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan kinerja PT Telkom pasca privatisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja

PT Telkom pasca privatisasi mengalami peningkatan secara signifikan. Perubahan strategi, struktur dan budaya organisasi merupakan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja PT Telkom pasca privatisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukan restrukturisasi pada BUMN. Privatisasi pada PT Tambang Batu Bara misalnya digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Sasaran dari privatisasi adalah mendapatkan dana, meningkatkan efisiensi.

Di samping itu diperlukan adanya kepemilikan suatu konsep (konseptualisasi) dari mekanisme pemerintahan guna memanfaatkan praktisi dalam menganalisis perusahaan yang telah melakukan privatisasi (Ward, et.al, 2009). Tantangan yang dihadapi oleh anggota dewan direksi di dalam mengelola konflik dengan cara mekanisme campuran pemerintahan dan praktisi pada tataran kinerja keuangan. Di dalam penelitian ini juga ditunjukkan bahwa, di bawah kondisi kinerja keuangan privatisasi yang buruk, para pemegang saham dapat melakukan pemantauan eksternal yang efektif guna meningkatkan efektivitas tata kelola keuangan perusahaan.

**H<sub>5</sub>: Privatisasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.**

### 2.2.6. Ukuran Perusahaan dan Kinerja Keuangan BUMN

Besar kecilnya suatu perusahaan dapat ditentukan dengan beberapa hal, antara lain : total penjualan, total aset, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata total aset dimana mempengaruhi profitabilitas tapi tidak secara langsung. (ferri dan jones, 1979). Sehubungan dengan total aset apabila perusahaan memiliki aset total yang besar menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai tahap kedewasaan (*maturity*) atau *weel established*. Secara umum perusahaan yang mempunyai total aset yang relatif besar dapat beroperasi dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang total asetnya rendah. Oleh karena itu perusahaan dengan total aset besar lebih mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi (dalam Arrayani, 2003).

Perusahaan besar yang dianggap telah mencapai tahap kedewasaan merupakan suatu gambaran bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan kecil (dalam Seniwati Sembiring, 2008).

**H<sub>6</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.**

### 2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang meneliti tentang hubungan antara mekanisme *good corporate governance* dan privatisasi terhadap kinerja keuangan perusahaan ini,

merujuk pada beberapa penelitian terdahulu untuk lebih memperjelas penelitian terdahulu, berikut matriknya.

**Tabel 2.1. Matrik Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Prawirasantosa dan Setyanto (2007)	Kebijakan Privatisasi dan Implikasinya terhadap Kinerja Badan Usaha Milik Negara: Studi kasus PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk	Privatisasi; NPM; leverage operasi; ukuran perusahaan	Analisis Regresi berganda	Privatisasi berpengaruh signifikan terhadap NPM, Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap NPM
2	Dalton D dan Daily C (1994)	Board of directors leadership and structure: Control and performance implications	Kepemilikan Institusional; <i>board size</i> ; Proporsi komisaris independen; EPS, ROE, dan NPM	Analisis Regresi Berganda	<i>Board size</i> berpengaruh signifikan terhadap NPM; Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap NPM;
3	Galiani sebastian; Paul Gertler; Ernesto Schargrodsky; and Federico Struzenegger (2003)	The Costs and Benefits of Privatization in Argentina: A Microeconomic Analysis	Privatisasi, ROE, ROA, NPM, Ukuran perusahaan, Tenaga Kerja, CFROA	Analisis Regresi Berganda	Privatisasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROE; Privatisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPM; Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPM
4	Seniwati Sembiring (2008)	Pengaruh Ukuran Perusahaan dan	Ukuran perusahaan, EPS, NPM,	Teknik analisis regresi	Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan

		Kebijakan Pendanaan terhadap Kinerja Keuangan pada BUMN	kebijakan pendanaan	berganda.	terhadap kinerja keuangan BUMN.
5	Suhardjanto dan Apreria. (2010)	Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Audit Serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan	Komite Audit; Proporsi Komisaris Independen; Board Size; CFROA dan NPM.	Analisis regresi OLS	Komite audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap NPM; Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPM dan CFROA; <i>Board size</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPM
6	Darmawati, Deni; Khomsiyah; Rika (2004)	Analisis Indikator <i>Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Perusahaan dan Manajemen Laba	Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Manajemen Laba, Kinerja Keuangan	Analisis regresi berganda dan analisis regresi sederhana	Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap NPM; Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPM; Manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
7	Ahmed and Nichols (1994)	Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Independen dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan	Latar belakang pendidikan komisaris, lama jabatan komisaris, Proporsi Komisaris Independen, <i>board size</i> , NPM	Analisis regresi berganda (OLS)	Latar belakang pendidikan komisaris utama berpengaruh positif signifikan terhadap NPM. Proporsi komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPM, <i>Board Size</i> tidak berpengaruh terhadap NPM

8	Todd Mitton (2002).	A Cross-Firm Analysis of the Impact of Corporate Governance on the East Asian Financial crisis	Indikator <i>good corporate governance</i> , kinerja perusahaan.	Analisis regresi berganda	Seluruh indikator <i>good corporate governance</i> mempunyai dampak kinerja yang kuat terhadap kinerja perusahaan selama periode krisis di Asia.
9	Joel.T Harper (2002)	Pengaruh Privatisasi terhadap Kinerja Keuangan di negara Ceko	Total Penjualan, NPM, Ekuitas, Aset, Privatisasi	Penelitian ini membandingkan dua tahun pra-privatisasi dan post-privatisasi data menggunakan tanda Wilcoxon peringkat test	Privatisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan.
10	Sam'ani (2008)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Dan <i>Leverage</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2004 – 2007	Komite audit, Kepemilikan Institusional, Proporsi Komisaris Independent, kinerja perusahaan, Ukuran direksi, Laverage	Analisis Regresi Berganda	Komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Proporsi komisaris Independent tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

#### 2.4. Kerangka Pemikiran Penelitian

Penelitian yang berjudul “ANALISIS PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *PRIVATISASI* TERHADAP KINERJA KEUANGAN: Studi Pada BUMN Yang Tercatat Di Bursa Efek

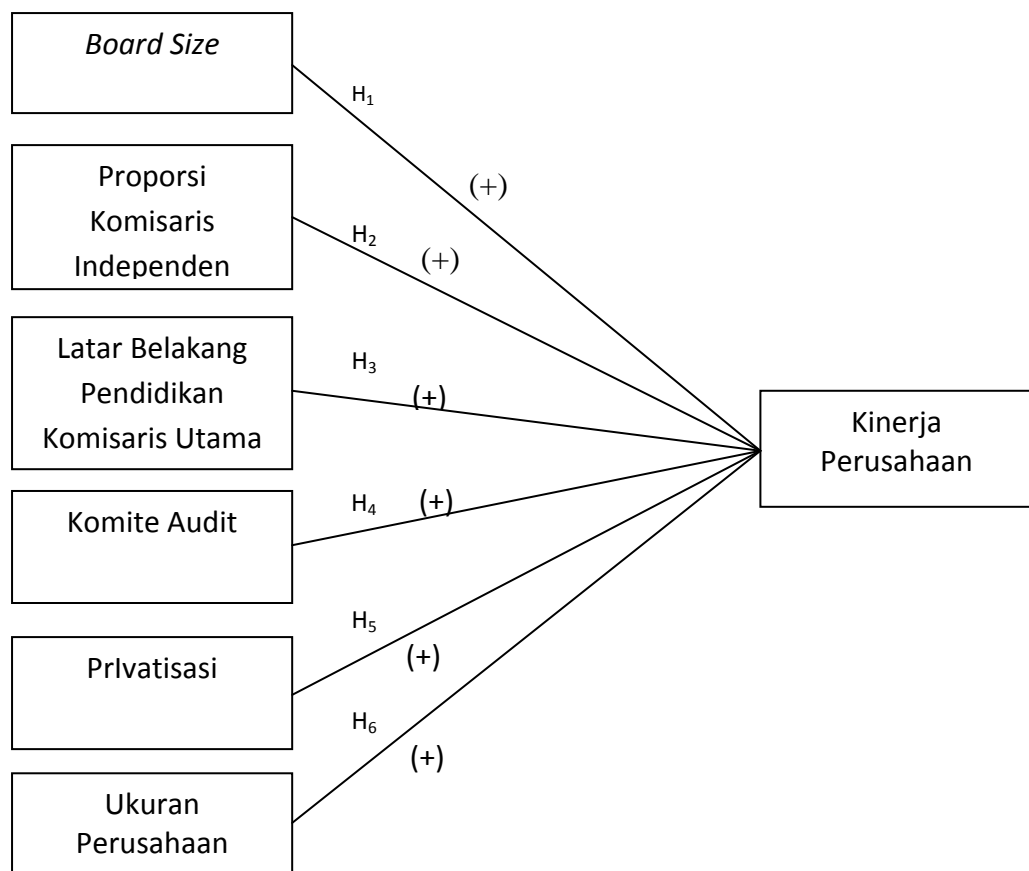


**Indonesia (BEI)**” ter diri atas variabel independen *board size*, proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, latar belakang pendidikan, privatisasi, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan BUMN.

Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan bahwa mekanisme *good corporate governance* serta privatisasi dan *ukuran perusahaan* dapat dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Berikut gambaran kerangka pemikiran penelitian ini

**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian**



### **Gambar 2.2 Skema Konsep Penelitian**

Sumber: Prawirasantosa dan Setyanto, Dalton D dan Daily C, Galiani sebastian;, Suhardjanto dan Apreria

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

##### **3.1.1. Variabel Penelitian.**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu variabel dependen, variabel independen dan variabel kontrol.

1. Variabel dependen (variabel terikat)

Variabel terikat adalah variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti.

Variabel dependen identik dengan variabel terikat, yang dijelaskan, atau *dependent variable*. (Kuncoro. 2004). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah kinerja keuangan perusahaan.

2. Variabel independen (variabel bebas)

Variabel independen merupakan penjelas, atau *independent/explanatory variable*. Variabel ini biasanya dianggap sebagai variabel prediktor atau penyebab karena memprediksi atau menyebabkan variabel dependen (Kuncoro. 2004). Penelitian ini memiliki variabel independen berupa:

a. Komite audit

b. Ukuran dewan komisaris

c. Proporsi komisaris independen

d. Latar belakang pendidikan komisaris utama

e. Privatisasi dan

### 3. Variabel kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi faktor luar yang diteliti

#### 3.1.2. Definisi Operasional Variabel

Untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, berikut adalah variabel operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini.

##### a. Variabel independen

##### 1) *Dummy* variabel *Board size*

Indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Jansen (1993) yaitu jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan yang dibawah 1-7 memakai angka 1 dan lebih dari 7 memakai angka 0

$$\text{Ukuran Dewan Komisaris} = \sum \text{Komisaris Internal} + \sum \text{Komisaris Eksternal}$$

##### 2) Proporsi komisaris independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan

perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2004). Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan.

$$\text{Proporsi komisaris independen} = \frac{\sum \text{komisaris Independen}}{\sum \text{Board Size}} \times 100\%$$

3) Dummy variabel Latar belakang pendidikan presiden komisaris

Indikatornya  $D_1 = 0$ , indikator komisaris yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan Bisnis.

$D_1 = 1$ , indikator komisaris yang mempunyai latar belakang pendidikan Bisnis.

4) Komite Audit Independen

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba (*earnings management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal. Komite yaitu jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan (Junaidi, 2007). Variabel ini menunjukkan jumlah komite audit pada perusahaan antara periode tahun penelitian.

5) Dummy Variabel Privatisasi.

Indikatornya  $D_1 = 0$ , indikator BUMN yang belum diprivatisasi.

$D_1 = 1$ , indikator BUMN yang telah diprivatisasi.

b. Variabel Kontrol

1) Ukuran perusahaan.

Ukuran perusahaan diukur menggunakan log natural total aset, mengacu pada penelitian Seniwati (2008).

$$\text{Ukuran perusahaan} = \ln \text{ total aset}$$

c. Variabel dependen

1) Kinerja Keuangan BUMN

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto dan Apreria (2010), laba (NPM) digunakan sebagai proksi untuk mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih- pajak}}{\text{Penjualan bersih}}$$

Tabel 3.1 Definisi Operasional

No	Nama variabel	Definisi Operasional	Cara pengukuran
1	Ukuran dewan komisaris	jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan	D1= Jumlah komisaris 1-7 D0= Jumlah komisaris diatas 7
2	Proporsi komisaris independen	anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan	Jmlah komisaris Independen  Board Size
3	Latar belakang pendidikan komisaris utama	Basis pendidikan tertentu yang dimiliki oleh komisaris utama, dalam penelitian ini menggunakan basis pendidikan ekonomi.	D1= Basis pendidikan ekonomi  D0= Tidak mempunyai basis pendidikan ekonomi
4	Komite audit	Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat <i>opportunistic</i> manajemen yang melakukan manajemen laba ( <i>earnings management</i> ) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal	Jumlah keseluruhan komite audit yang ada dalam perusahaan
5	Privatisasi	Penurunan kontrol pemerintah dan meningkatkan kontrol swasta dalam suatu kegiatan atau kepemilikan aset.	D1= setelah privatisasi D0= sebelum privatisasi
6	Ukuran perusahaan	Ukuran atau besaran total aset yang dimiliki oleh perusahaan	Size = Ln Total Aset
7	Net Profit Margin	Rasio untuk menghitung seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada total penjualan perusahaan.	NPM= Laba bersih/ penjualan

### 3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik *proporsional*.

Populasi digunakan dalam penelitian ini adalah BUMN yang telah diprivatisasi melalui IPO (*initial public offering*) atau yang terdaftar pada BEI yang berjumlah 20 BUMN. Dikarenakan penelitian menggunakan *time series* 2 tahun sebelum privatisasi dan 4 tahun setelah privatisasi, sehingga sampel yang digunakan adalah

BUMN yang melakukan privatisasi sebelum tahun 2007 jadi ada 10 sampel yang digugurkan karena tidak sesuai dengan kriteria.

Berdasarkan kriteria di atas dapat diambil sampel sejumlah 10 perusahaan (20 sampel), sebagai berikut.

**Tabel 3.2 Sampel Penelitian**

NO	Perusahaan
1	PT. Bank Negara Indonesia
2	PT. Indocement Tungal Perkasa Tbk.
3	PT. Indofarma Tbk.
4	PT. Kimia Farma (persero) Tbk.
5	PT. Indosat Tbk
6	PT. ANTAM (persero) Tbk.
7	PT. Perusahaan Gas Negara Tbk.
8	PT. Semen Gresik (persero) Tbk
9	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk
10	PT. Tambang Batubara (persero) Tbk.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa data laporan keuangan dari perusahaan manufaktur yang menjadi sampel. Data diambil dalam periode privatisasi antara tahun 2002-2006 tahun (2 tahun sebelum privatisasi dan



4 tahun setelah privatisasi). Data bersumber pada Bursa Efek Indonesia, IDX dan Kementrian BUMN untuk periode pengamatan yang dibutuhkan.

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, metode pengambilan data yang digunakan yaitu dengan metode dokumentasi dikarenakan data berupa data sekunder. Metode pengambilan sampel digunakan metode data *pooling*. Data *pooling* adalah kombinasi antara data runtut waktu dan silang tempat. Data runtut waktu (*time-series*) yaitu data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variable tertentu berupa periode pengamatan yang runtut dari 2 tahun sebelum privatisasi hingga 4 tahun setelah privatisasi. Sedangkan data silang tempat (*cross-section*) yaitu data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu. Data silang tempat digunakan untuk mengamati respon dalam periode yang sama, sehingga variasi terjadinya adalah antar pengamatan (Kuncoro, 2004). Data silang tempat menunjukkan jumlah sampel yang diambil dalam penelitian.

### **3.5. Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan statistik deskriptif, regresi berganda dan uji beda dua mean untuk pengujian hipotesis. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS *release* 16.

### **3.5.1. Statistik Deskriptif**

Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian (Ferdinand, 2006). Gambaran yang diberikan pada data dalam Ghozali (2005), dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Pada penelitian deskriptif ini digunakan metode numerik untuk mengenali pola sejumlah data, merangkum informasi yang terdapat dalam data tersebut, dan menyajikan informasi tersebut dalam bentuk yang diinginkan.

### **3.5.2. Uji Asumsi Klasik**

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memenuhi sifat dari estimasi regresi yang meliputi:

#### **3.5.2.1. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2005). Uji normalitas dilakukan dengan analisis grafik yaitu dengan melihat grafik histogram dan *normal probability plot* serta uji statistic non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

### 3.5.2.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2005). Dalam Ghozali (2005) juga disebutkan model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Uji ini dilakukan dengan perhitungan nilai Tolerance dan VIF. Dasar analisisnya adalah:

- a. Jika nilai *tolerance*  $> 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF < 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.
- b. Jika nilai *tolerance*  $< 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF > 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

### 3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah terjadinya ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, dalam penelitian ini digunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada atau tidaknya heteroskedasitas dapat dilakukan dengan melihat adanya pola tertentu pada grafik scatter plot antara SRESID dan ZPRED diamana sumbu Y adalah Y

yang diprediksi dan sumbu X adalah residual ( $Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$ ) yang telah di *studentied*. Dasar analisisnya adalah:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### **3.5.2.4. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya) (Ghozali, 2005). Dalam Ghozali juga dijelaskan bahwa jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji Run Test. Indikasinya apabila hasil nilai test dengan probabilitasnya lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5% maka tidak terjadi gangguan autokorelasi. Menurut Gujarati (1995) pengujian statistik Durbin Watson atau *d statistic* dihitung dengan rumus:

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (U_t - U_{t-1})^2}{\sum_{t=2}^n U_t^2}$$

Nilai d dalam uji Durbin – Watson dua sisi digambarkan sebagai berikut:

Daerah Kritis Tolak $H_0$	Daerah Ketidakpastian	Tidak Menolak $H_0$ Tidak ada Korelasi	Daerah Ketidakpastian	Daerah Kritis Tolak $H_0$
0	$d_L$	$d_U$	$(4 - d_U)$	$(4 - d_L)$
		2		4

**Gambar 3.1 Uji Durbin-Watson**

Gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Apabila  $d < d_L$  atau  $d > (4 - d_U)$  maka hipotesis nol ditolak dan sebaliknya hipotesis alternatif diterima, berarti terdapat autokorelasi.
- Apabila nilai d terletak diantara  $d_L$  dan  $(4 - d_U)$  maka hipotesis nol diterima yang juga berarti tidak ada autokorelasi.
- Apabila nilai d terletak antara  $d_L$  dan  $d_U$  atau antara  $(4 - d_U)$  dan  $(4 - d_L)$  maka uji Durbin-Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Pada nilai ini tidak dapat disimpulkan apakah terdapat autokorelasi atau tidak ada autokorelasi.

Secara sederhana, gejala adanya autokorelasi dapat juga dilihat langsung dengan cara melihat hasil uji statistik untuk Durbin-Watson. Hasil uji statistik

Durbin-Watson antara 0 sampai 4. Apabila hasil uji Durbin-Watson dekat dengan 2, berarti tidak ada autokorelasi

### 3.5.3. Analisis Regresi OLS (*Ordinary Least Squares*)

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi OLS (*Ordinary Least Squares*) atau pangkat kuadrat terkecil biasa. Inti metode OLS adalah mengestimasi suatu garis regresi dengan cara meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut (Ghozali, 2005). Penelitian ini memiliki variabel dependen yaitu *Net Profit Margin* (NPM) dan variabel independen yaitu Komite Audit (JKA), Ukuran Dewan Direksi (BSIZE), Proporsi Komisaris Independen (PROKI), Privatisasi (PRIV), Tingkat Pendidikan Komisaris Utama (TPKU) dan Ukuran Perusahaan (UKP). Untuk menguji seluruh hipotesis dalam penelitian ini, maka persamaan yang dibentuk dirumuskan sebagai berikut :

Persamaan regresi berganda untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini :

$$NPM_i = \alpha + \beta_1 BSIZE_i + \beta_2 PROKI_i + \beta_3 JKA_i + \beta_4 TPKU_i + \beta_5 PRIV_i + \beta_6 UKP_i + e$$

#### Keterangan Persamaan Regresi Berganda

Simbol	Keterangan
NPM	Keuntungan Perusahaan setelah dikurangi pajak
	Ukuran Dewan Komisaris ( <i>Board Size</i> )
BSIZE	D1 = 0, BUMN dengan <i>Board Size</i> 1-7
	D1 = 1, BUMN dengan <i>Board Size</i> lebih dari 7

PROKI	Proporsi Komisaris Independen
JKA	Jumlah Komite Audit
	Tingkat Pendidikan Komisaris Utama
	D1 = 0, komisaris yang memiliki latar belakang
TPKU	pendidikan bisnis
	D1 = 1, komisaris yang tidak memiliki latar
	belakang pendidikan bisnis
PRIV	Privatisasi, D1 = 0, BUMN sebelum privatisasi
	D1 = 1, BUMN setelah privatisasi
UKP	Ukuran perusahaan
$\alpha$	Konstanta
$\beta$	Koefisien Regresi
$e$	<i>Error</i>
$i$	<i>Observasi</i>

---

### 3.5.4. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini, digunakan regresi OLS (*Ordinary Least Square*). Berikut langkah-langkah pengujian yang dilakukan.

#### 3.5.4.1. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Dalam Ghozali juga

dijelaskan bahwa nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Pada uji ini digunakan nilai *Adjusted*  $R^2$ . Apabila nilai *Adjusted*  $R^2$  bernilai negatif, maka menurut Gujarati (dalam Ghozali, 2005) nilai *Adjusted*  $R^2$  dianggap bernilai 0.

#### **3.5.4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2005). Untuk menguji hipotesis dengan uji statistik F menggunakan kriteria (Ghozali, 2005) sebagai berikut:

- a. *Quick look* : bila nilai F lebih besar daripada 4 maka  $H_0$  dapat ditola pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikansi mempengaruhi variabel dependen diterima.
- b. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ .



#### 3.5.4.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut (Ghozali, 2005):

- a. *Quick look* : bila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka  $H_0$  dapat ditolak jika nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen diterima.
- b. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen diterima.